

# ANALISIS PEMBANGUNAN PERTANIAN PADA NAGARI BINAAN DI KABUPATEN PASAMAN

Syofyan Fairuzi, Rina Sari, Ira Wahyuni S.

**Abstract:** *This research was conducted in Nagari Tanjung Betung sub district, distric Pasaman. The purposes of this study are to analyse the Program of Nagari Binaan and Agricultural Development Program as well as to design the planning of agricultural development in the research area. The finding shows that: (1) this program is not continually implemented, and the Program of Nagari Binaan in Nagari Tanjung Betung has not been integrated with the agricultural development program, and (2) there are some problems in applying of the program such as the limited numbers of people who carry out the program, the lack of coordination, the limitation of facilities, and lack of support from government especially in term of policy and fund. By using SWOT analysis, some strategies that could be implemented are: (1) increasing role anf function of institution, (2) increasing the quality of human resources, and (3) functioning nagari asset based on government policy and the development of community.*

**Kata kunci:** *program, nagari binaan, pembangunan pertanian*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian umumnya adalah; 1) terbatasnya kepemilikan dan akses terhadap lahan produktif; 2) lemahnya penyediaan dukungan dan pendampingan usaha berkelanjutan, 3) keberpihakan dan dukungan kebijakan pemerintah belum kuat dan kurang terarah, 4) kesulitan mencapai skala usaha dan lemahnya kerjasama atau sinergi usaha, dan masih terbatasnya penerapan teknologi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas, serta tampilan produk, 5) kesulitan mengakses permodalan, 6) mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang

tidak berpihak, 7) kapasitas SDM dan penyuluhan pertanian yang belum memadai, 8) rendahnya pemanfaatan potensi pertanian dan peluang pasar, 9) lemahnya sistem dan jaringan distribusi sarana produksi, dan terbatasnya prasaran penunjang pembangunan pertanian (Pemda Sumbar, RPJM 2006-2010).

Nagari adalah representasi tiga institusi utama, yakni agama (disimbolkan dengan mesjid), politik (disimbolkan dengan balai adat) dan ekonomi (disimbolkan oleh balai). Nagari adalah unit pemerintahan terendah yang dijalankan berdasarkan hak asal usul dan merupakan kebanggaan rakyat Propinsi Sumatera Barat. Meskipun dalam Perda No 13 tahun 1983 keberadaan Nagari

diakui, namun hal itu hanya sekedar mengakui Nagari sebagai kesatuan

Secara khusus, pada agenda Memberdayakan Nagari sebagai Basis Pembangunan di Propinsi Sumatera

masyarakat hukum adat bukan sebagai unit pemerintahan.

terata Barat terdapat 3 Prioritas dan 10 program utama yang saling menunjang satu sama lainnya (Tabel 1).

**Tabel 1. Prioritas dan Program Pembangunan pada Agenda Memberdayakan Nagari Tahun 2006-2010**

No	Prioritas	Program Pembangunan
I	Prioritas Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari	1. Peningkatan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Nagari
		2. Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Nagari
II	Prioritas Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari	3. Pelaksanaan Penataan Batas Nagari
		4. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari
		5. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Nagari
		6. Pendataan Aset Nagari
III	Prioritas Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Perantau dalam Pembangunan	7. Peningkatan Keberdayaan Nagari
		8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
		9. Peningkatan Partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan.
		10. Peningkatan Keterpaduan Pengelolaan Pembangunan

**Sumber: (Perda Propinsi Sumbar no 4 tahun 2007 tentang RPJM 2006-2010)**

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui SK Gubernur no 140-257-2005 telah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Nagari Binaan dengan Pilot Proyek 11 Nagari. Selanjutnya disusul oleh Peraturan Gubernur no 53 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Nagari Binaan. Pembentukan nagari binaan bertujuan mewujudkan nagari yang berdaya dan mampu melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan seluruh kekuatan sumber daya yang dimiliki dengan menyelenggarakan pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsi pelayanan kepada anak nagari. Salah satu nagari binaan yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan uraian di atas maka dirasa perlu suatu kajian komprehensif untuk menganalisis pelaksanaan program nagari binaan dalam meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan pertanian di nagari karena mata pencaharian terbesar penduduk di nagari pada umumnya adalah berasal dari sektor pertanian.

### Perumusan Masalah

Secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program-program yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan, dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program nagari dan program pembangunan pertanian pada Nagari binaan?
2. Bagaimana langkah-langkah perencanaan yang efektif untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nagari binaan?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pem-

bangunan pembangunan pertanian di nagari binaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis program pertanian pada nagari binaan
2. Mendesain perencanaan pembangunan pertanian pada nagari binaan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan gabungan survei dan studi kasus serta studi analisis data sekunder. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian dengan pendekatan studi kasus, berusaha memotret profil dan realitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari Binaan di Sumatera Barat. Studi pustaka atau analisis data sekunder, menggunakan metode deskriptif dan normatif untuk menemukan konsep dan aturan normatif pemerintahan dan pembangunan Nagari serta menurut nilai-nilai lokal serta menganalisis kebijakan pemerintahan dan pembangunan Nagari.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yang merupakan salah satu nagari binaan dari 11 pilot proyek nagari binaan yang ada di Sumatera dalam rangka penguatan kelembagaan pemerintahan nagari. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja

karena merupakan daerah baru hasil dari pemekaran kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Secara umum data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif, dan analisis kuantitatif jika diperlukan. Secara khusus Penelitian terdiri dari tiga tahap.

Tahap pertama penelitian ini adalah untuk menjawab tujuan 1 dan 2 yaitu menganalisis program nagari binaan dan program pembangunan pertanian yang sudah dilaksanakan serta kendala yang dihadapi oleh Dinas/instansi terkait yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan.

Tahap kedua adalah untuk menjawab sebagian dari tujuan 3 yaitu mendesain perencanaan pembangunan pertanian pada nagari binaan.

Tahap ketiga adalah untuk menjawab tujuan 3 yaitu mendesain perencanaan pembangunan pertanian pada nagari binaan. Tahap ini didasari oleh hasil penelitian tahap pertama dan kedua, meliputi: (1) masalah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pembangunan nagari binaan dan program pembangunan pertanian, dan (2) strategi pengelolaan Nagari yang ideal, tepat guna dan tepat sasaran. Akhirnya, merancang langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan pengembangan nagari dilakukan dengan menggunakan metode SWOT, seperti Tabel 2.

**Tabel 2. Bagan Analisis SWOT**

<i>FAKTOR INTERNAL</i>	<u>STRENGTH</u>	<u>WEAKNESSES</u>
<i>FAKTOR EKSTERNAL</i>	<u>STRATEGISO</u>	<u>STRATEGIWO</u>
<u>OPPORTUNITIES</u>	<u>STRATEGIST</u>	<u>STRATEGIWT</u>
<u>THREAT</u>		

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran umum Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman

Nagari Tanjung Betung terletak di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas 6.430 ha dan jumlah penduduk 10.835 orang yang terdiri atas 5.349 laki-laki dan 5.486 perempuan. Nagari ini terdiri atas sembilan jorong, yaitu : (1) Jorong Air Hangat, (2) Jorong VII Kauman Selatan, (3) Jorong Kampung Tujuh, (4) Jorong Kauman I, (5) Jorong Purbanauli, (6) Jorong Rambahan, (7) Jorong Rambahan Baru, (8) Jorong Rambahan Selatan, dan (9) Jorong Tanjung Betung. Kesembilan jorong tersebut dihuni oleh 2.479 KK yang bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani (60%).

Kepemilikan lahan di Nagari Tanjung Betung terdiri atas 3.721 orang sebagai pemilik lahan sawah, 1.000 orang pemilik ladang, dan 2.003 orang adalah buruh tani. Sedangkan lahan yang digunakan untuk pemukiman seluas 76 ha, untuk perkebunan karet seluas 431 ha, perkebunan kakao seluas 139 ha, dan sisanya untuk lain-lain. Sementara kehutanan kepemilikannya

terbagi atas kepemilikan Negara seluas 2.149 ha dan kepemilikan adat seluas 1.659 ha.

### Analisis pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan pada nagari Tanjung Betung

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan pengumpulan data dan informasi serta diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Informasi awal diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumatera Barat dan Bappeda Kabupaten Pasaman. Dari diskusi yang dilakukan dengan Staf Bappeda Propinsi Sumatera Barat, kegiatan ini tidak dilakukan secara berkelanjutan. Idealnya dalam melaksanakan program nagari binaan sebaiknya dilakukan pendampingan secara terus menerus dengan program yang berkelanjutan.

Berdasarkan diskusi melalui proses FGD yang telah dilakukan dengan perangkat nagari, maka dapat ditampilkan program-program pembangunan terkait nagari binaan yang telah dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung.

**Tabel 3. Program-program yang Terkait Pembangunan Nagari Binaan di Tanjung Betung**

No.	Program-program yang terkait Nagari di Sumatera Barat	Program-program yang terdapat pada Nagari Binaan
1.	Peningkatan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	Pembentukan Lembaga-lembaga di Tingkat Nagari (yaitu : LPMN tahun 2006, LAN, Bamus (sebelumnya BPAN) tahun 2008, PKK, Karang Taruna, Wirid Yasinan, Posyandu, Kelompok Tani, Gapoktan)
2.	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Nagari	Pembuatan Anggaran dan Pelaporan
3.	Pelaksanaan Penataan Batas Nagari	Pembuatan tugu batas Nagari Pertemuan pembuatan Peta Nagari
4.	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi
5.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Nagari	Pengiriman tenaga pengelola keuangan ke pelatihan-pelatihan yang diadakan Pemerintah Kabupaten
6.	Pendataan Aset Nagari	Pendataan dan Registrasi Aset-aset Nagari
7.	Peningkatan Keberdayaan Nagari	-
8.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	-
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau dalam Pembangunan	-
10.	Peningkatan Keterpaduan Pengelolaan Pembangunan	Penyusunan RPJM Nagari

Nagari Tanjung Betung adalah salah satu nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Pilot Proyek Pembentukan Nagari Binaan sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 140-257-2005, yang selanjutnya disusul oleh Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Nagari Binaan. Dalam kurun waktu pelaksanaan proyek telah dilaksanakan beberapa program pembangunan yang mengacu dan berpedoman pada Prioritas dan Program Pembangunan pada Agenda Memberdayakan Naga-

ri sebagai Basis Pembangunan Tahun 2006-2010.

Program-program (kegiatan) pembangunan dimaksud adalah : (1) Pembentukan lembaga-lembaga di tingkat nagari (LPMN, LAN, Bamus, Karang Taruna, Wirid Yasinan, Posyandu, Kelompok Tani, dan Gapoktan), (2) Pembuatan anggaran dan pelaporan, (3) Pembuatan tugu batas nagari dan peta nagari, (4) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan administrasi, (5) Pengiriman tenaga pengelola keuangan ke pelatihan-pelatihan, (6) Pendataan

dan registrasi aset nagari, dan (7) Penyusunan RPJM nagari.

Seluruh program (kegiatan) yang telah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah nagari dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan prioritas kemampuan dalam penataan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga, kemampuan dalam penataan administrasi, keuangan dan aset nagari, serta kemampuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan. Program (kegiatan) yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi manfaat yang nyata dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat Nagari Tanjung Betung.

Berdasarkan keadaan demografi dan penggunaan lahan, Nagari Tanjung Betung adalah daerah pertanian/perkebunan dimana 60% penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Dalam konteks pembinaan akselerasi pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, maka SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian, telah melakukan beberapa program pembangunan. Program (kegiatan) dimaksud diantaranya: tanam padi

sebatang, fasilitasi bina padi, dan membangun jaringan irigasi tingkat usahatani (Jitut). Kegiatan yang dilaksanakan juga sudah menghasilkan beberapa sekolah lapangan seperti Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Sekolah Lapangan Padi Tanam Sebatang (SLPTS)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa program pembangunan nagari binaan yang dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung belum terintegrasi dengan program pembangunan pertanian yang ada. Namun demikian, berdasarkan informasi masyarakat dalam FGD, program-program pembangunan tersebut tetap memberi manfaat bagi masyarakat, walaupun terdapat beberapa kendala. Misalnya, dalam pemanfaatan Jitut belum mampu menjangkau sawah yang cukup luas dan pemeliharannya juga belum memadai, dimana dirasakan adanya kekurangan tenaga pemelihara dan tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.

Berikut ditampilkan kendala dan masalah yang dirasakan oleh masyarakat dan perangkat nagari dalam melaksanakan program pembangunan nagari binaan.

**Tabel 4. Masalah dan Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Nagari Binaan**

No.	Aspek Program dan Kegiatan Pembangunan	Masalah dan kendala internal Nagari	Masalah/kendala eksternal Nagari
1.	Peningkatan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum adanya pertemuan rutin (terjadwal) antar lembaga Nagari sehingga koordinasi relatif lemah</li> <li>- Sudah berjalan, tapi kurang maksimal karena wali nagari masih PJs</li> <li>- LAN belum berfungsi dengan baik</li> </ul>	-
2.	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya koordinasi lembaga-lembaga nagari dengan pemerintahan nagari</li> <li>- Dalam pembuatan anggaran tidak sesuai dengan rencana nagari, dari 100 % yang diinginkan hanya 30 % yang terlaksana</li> <li>- Tidak ada laporan kegiatan</li> </ul>	- Kebijakan Kabupaten tidak sesuai dengan permintaan nagari
3.	Pelaksanaan Penataan Batas Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya anggaran untuk penataan batas nagari, walaupun sudah ada batas berupa taman bunga dan diputuskan berdasarkan pertemuan LAN</li> </ul>	-
4.	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya anggaran untuk pelatihan-pelatihan pengelola administrasi dalam rangka peningkatan SDM</li> </ul>	- Proses pelayanan administrasi di nagari sering terkendala matinya aliran listrik
5.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasukan nagari masih kurang, hanya berasal dari biaya administrasi dari masyarakat (misalnya dalam pembuatan surat-surat) dan dari Kabupaten (DAUN)</li> <li>- Pengelolaan pasar berada di tangan LAN, tidak ada pemasukan untuk nagari</li> <li>- Belum terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan, terutama terkendala anggaran</li> </ul>	-
6.	Pendataan Aset Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah nagari masih dikontrakkan oleh perangkat desa (lama)</li> <li>- Aset tidak dimiliki nagari karena masih dikuasai oleh pemerintahan desa (lama)</li> <li>- Registrasi aset sudah dilaksanakan dan sudah diupayakan sertifikasi tapi baru satu yang berhasil (?)</li> </ul>	- Pemerintahan desa (lama) masih menguasai aset nagari
7.	Peningkatan Keberdayaan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan oleh PNPM-MPd (misalnya : SPP, Air bersih, jalan usahatani,dll), belum ada upaya dari nagari</li> </ul>	-
8.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan tidak terlaksana disebabkan adanya program kondisional (?)</li> <li>- Masih minimnya dana</li> </ul>	-
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya pertemuan nagari dan perantau untuk membangun nagari</li> <li>- Belum terjalinnya hubungan komunikasi formal antara pemerintahan nagari dan organisasi perantau</li> <li>- Masih minimnya partisipasi masyarakat dan perantau dalam membangun nagari, hanya sebatas ikut serta dalam penyusunan RPJM nagari</li> </ul>	-
10.	Peningkatan Keterpaduan Pengelolaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya partisipasi unsur masyarakat dalam penyusunan RPJM</li> <li>- Kegiatan penyusunan RPJM dan pendanaannya masih difasilitasi oleh PNPM</li> </ul>	-

Dalam pelaksanaan program (kegiatan) menghadapi beberapa kendala dan masalah, antara lain: masih relatif terbatasnya kemampuan (kapasitas) aparat pelaksana pemerintahan nagari sehingga kegiatan pengelolaan belum optimal, masih kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tidak adanya sumber keuangan nagari selain dari DAUN dan imbalan dari pengurusan administrasi sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak ada anggaran, belum adanya keputusan yang tegas terhadap wewenang pemerintahan nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset nagari, masih minimnya dukungan pemerintahan kabupaten dan provinsi terutama dalam kebijakan dan dana, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan perantau dalam program (kegiatan) pembangunan nagari.

Kendala-kendala di atas mengakibatkan pelaksanaan program (kegiatan) tidak optimal. Misalnya, hanya 30 % dari rencana pembangunan yang terealisasi. Demikian juga, walaupun lembaga-lembaga kelengkapan nagari sudah terbentuk, tetapi belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Batas desa juga sudah ada, tetapi baru berupa taman bunga yang sifatnya belum permanen. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat nagari juga sudah dilakukan walaupun dengan keterbatasan anggaran. Kegiatan penataan aset nagari juga sudah dilaksanakan, tapi baru satu yang baru berhasil disertifikasi. Aset nagari juga sudah dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan nagari, tetapi pengelolaannya belum jelas dan trans-

paran. Peningkatan keberdayaan masyarakat nagari juga terus dilakukan walaupun masih sangat tergantung dengan program pemerintah pusat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Masyarakat dan perantau juga sudah ikut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan nagari walaupun masih dalam taraf yang belum memadai, terutama dalam pelaksanaan program (kegiatan) yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari informasi dan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa program-program (kegiatan) pembangunan nagari pada Nagari Tanjung Betung belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, baik kendala yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Dapat dimengerti bahwa program-program (kegiatan) tersebut juga belum dapat memberi manfaat yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Tanjung Betung.

Di samping beberapa kendala yang ada, terdapat beberapa hal-hal positif (kemajuan) dari pelaksanaan program (kegiatan) pembangunan nagari. Hal ini dapat dilihat dari upaya terus menerus yang dilakukan walaupun dalam keterbatasan. Usaha-usaha untuk peningkatan penataan kelembagaan sudah dilakukan dengan terbentuknya lembaga kelengkapan nagari, yaitu: LPMN, LAN, Bamus, PKK, Karang Taruna, Wirid Yasinan, Posyandu, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani. Lembaga-lembaga yang dibentuk diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat dan mengasah kemampuan masyarakat dalam ber-

organisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan nagari. Lembaga yang dibentuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok pemuda sebagai generasi penerus di nagari dan para petani yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Nagari Tanjung Betung.

Demikian juga, selalu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) Sumberdaya Manusia, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan nagari, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan kabupaten dan provinsi. Aset-aset nagari juga terus diupayakan terdata (terregistrasi), tertata, dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber keuangan nagari. RPJM nagari juga sudah dirumuskan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nagari.

Pemerintahan nagari juga telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak kepada lembaga lembaga terkait di nagari, masyarakat, dan perantau dengan tujuan meningkatkan kesadaran membayar pajak, yang nantinya dapat meningkatkan

Faktor Internal :

a. Kekuatan (S) :

Terbentuknya lembaga-lembaga kelengkapan nagari, adanya RPJM sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan, adanya aset nagari berupa tanah, bangunan, dan pasar yang potensial sebagai sumber pemasukan kas nagari, adanya batas nagari

b. Kelemahan (W) :

Kualitas SDM yang belum memadai, keterbatasan dana yang dimiliki dan dikuasai oleh nagari

katkan jumlah pemasukan ke kas nagari. Perantau, sebagai anak nagari yang dianggap telah berhasil di rantau dan diharapkan tetap ikut berpartisipasi untuk kemajuan kampung halamannya, juga terus dirangkul oleh pemerintahan nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) membina komunikasi dan hubungan yang baik, (2) melibatkan perantau dalam pertemuan-pertemuan mengenai pembangunan nagari, dan (3) membentuk suatu organisasi (perkumpulan) perantau dan masyarakat.

### **Perumusan Strategi Perencanaan Program Pembangunan Pada Nagari Binaan**

Dari uraian dan informasi di atas dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang akan dijadikan Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan pembangunan.

1. Sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas
2. Nagari belum mempunyai aturan-aturan sendiri yang baku dan mengikat
3. Belum ada legitimasi penguasaan aset atas nama nagari
4. Kurangnya dukungan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan nagari

#### Faktor Eksternal

##### a. Peluang (O) :

1. Dukungan pemerintah dalam hal kebijakan dan program pembangunan
2. Ketersediaan dana untuk melaksanakan pembangunan
3. Dukungan fasilitasi dan pendampingan
4. Kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
5. Program PNPM-MPd yang dapat bersinergi dengan program pembangunan nagari

##### b. Ancaman (T) :

1. Persaingan dengan nagari lain dalam memperoleh dana pembangunan yang relatif terbatas
2. Kebijakan pemerintah yang cenderung berubah sesuai perkembangan masyarakat

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas dibuat rumusan strategi sebagai berikut :

##### a. Strategi Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunities*) :

Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga yang ada di nagari dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah

##### b. Strategi Kelemahan (*Weakness*) dan Peluang (*Opportunities*) :

Meningkatkan kualitas SDM dalam menyusun anggaran dan keterampilan negosiasi agar dapat

memanfaatkan dana yang tersedia

##### c. Strategi Kekuatan (*Strength*) dan Ancaman (*Threats*) :

Mendayagunakan lembaga yang ada termasuk aset di nagari sesuai dengan kebijakan pemda dan perkembangan masyarakat

##### d. Strategi Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threats*)

Peningkatan kualitas SDM untuk dapat memenangkan persaingan dengan nagari lain

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Program-program pembangunan nagari pada Nagari Tanjung Betung belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal.
2. Program pembangunan nagari binaan yang dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung belum terintegrasi dengan program pembangunan pertanian yang ada.

Dapat disarankan beberapa hal berikut:

1. Idealnya dalam melaksanakan program nagari binaan dilakukan pendampingan secara terus menerus dengan program yang berkelanjutan.
2. Pemerintah memfokuskan program pembangunan pertanian pada nagari yang mengandalkan sektor pertanian sebagai basis perekonomiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, 1992. Kepemimpinan dan struktur kekuasaan local dalam pembangunan. UGM. Yogyakarta.
- Effendi, Nursyirwan. 1999 : *Minangkabau Rural Market : Trade and Traders in West Sumatra, Indonesia*. LIT. Hambung.
- Effendi, Nursyirwan. 2001 : Paper Pada Simposium Internasional II Jurnal Antropologi Pada Tanggal 18-21 Juli 2001 di Kampus limau Manis Padang
- Haar, Ter, Bzn. 2001 : *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng Soebekti Poesponoto. Pradnya Paratama. Jakarta.
- Koesnoe, Mhd. 1994 : *Hak-hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, Antara Harapan dan Kenyataan*. Pekanbaru. Penerbit : Universitas Islam Riau.
- Mahadi. 1987: *Pembahasan Prasaran Djojodiguno Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Penerbit Binacipta. Yogyakarta.
- Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penerbit : Binacipta. Jakarta.
- Saleh, A.A. 2001 : *Manajemen Pelestarian Tanah dan Hutan*. Berbagai Kasus
- Mirwati, Yulia. 2002 : *Konflik-konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatera Barat*. Dissertasi Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mubyarto. 1998. Reformasi system ekonomi dari kapitalis menuju ekonomi kerakyatan. Aditya Media. Yogyakarta
- Nasution S. 2002 : *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Penerbit : PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurullah, Dt. Parpatieh Nan Tuo. 1999: *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah Padang.
- Perda Propinsi Sumbar no 4 tahun 2007 tentang RPJM 2006-2010).
- Poneddy, Dedy. 2003 : *Analisa dan Resolusi Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Agam*. Thesis Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.
- Rahardjo. 1991 : *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional*.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media. 446 hal.
- Soekanto, Soejono. 2003 : *Hukum Adat Indonesia*. PT. Rajagrafindo. Jakarta

Soepomo, R. 1997 : *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Pradnya Paramitha. Jakarta.

Syahmunir, A.M. 2000 : *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan*

*Pembangunan*. Makalah Dalam Workhop Tanah Ulayat di Sumatera Barat Kantor Wilayah Pertanahan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.